



## Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Karet di Kabupaten Pasaman

Afrina Zhilla Putri<sup>1</sup>, Faidil Tanjung<sup>2</sup>, Vonny Indah Mutiara<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Email: [afrinazhilla@gmail.com](mailto:afrinazhilla@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Email: [faidil@agr.unand.ac.id](mailto:faidil@agr.unand.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Email: [mutiaravonny@agr.unand.ac.id](mailto:mutiaravonny@agr.unand.ac.id)

Artikel Diterima: (16 Agustus 2025)

Artikel Direvisi: (9 Oktober 2025)

Artikel Disetujui: (10 Desember 2025)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the competitiveness of rubber commodities through comparative and competitive advantages and analyze the impact of government policies on rubber commodities in Pasaman Regency. This study employed a survey method. The data analysis used in this study is quantitative using the Policy Analysis Matrix (PAM) measurement tool. The results of the study show that rubber commodities in Pasaman Regency have competitiveness based on competitive advantage and comparative advantage as seen from the PCR value of 0,65 and DRCR 0,32 which is smaller than one. The impact of the rubber output policy causes the private price of rubber to be lower compared to the social price. The impact of the production input policy causes the private price of tradable inputs to be higher than the social price. The impact of the input-output policy has caused a decrease in producer surplus, which means that there is no economic incentive to increase rubber production. Therefore, it is recommended to the Pasaman Regency government to provide counseling to farmers to increase productivity and quality of rubber by paying attention to cultivation techniques and the use of inputs so that they can obtain more competitive prices.*

**Keywords:** Competitiveness, Rubber, Policy analysis Matrix

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas karet berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif serta dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas karet di Kabupaten Pasaman. Metode yang digunakan adalah metode survei dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan pendekatan *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas karet di Kabupaten Pasaman memiliki daya saing, baik secara kompetitif maupun komparatif, yang ditunjukkan oleh nilai PCR sebesar 0,65 dan DRCR sebesar 0,32 yang masing-masing lebih kecil dari satu. Kebijakan *output* karet berdampak pada harga privat karet lebih rendah dibandingkan dengan harga sosialnya, sedangkan kebijakan *input* produksi berdampak pada harga privat *input tradable* yang lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya. Kombinasi kebijakan *input-output* menyebabkan penurunan surplus produsen yang menunjukkan belum adanya insentif ekonomi untuk meningkatkan produksi karet. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Pasaman agar memberikan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karet dengan memperhatikan teknik budidaya dan penggunaan *input* sehingga mampu memperoleh harga yang lebih kompetitif.

**Kata Kunci:** Daya Saing, Karet, Policy Analysis Matrix

---

Penulis Koresponden:

Nama : Vonny Indah Mutiara

Email : [mutiaravonny@agr.unand.ac.id](mailto:mutiaravonny@agr.unand.ac.id)

## Pendahuluan

Komoditas karet (*Hevea brasiliensis* Muell. Arg) merupakan tanaman perkebunan yang memiliki potensi dalam perekonomian nasional. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis di Indonesia dan pasar internasional (Anwar & Suwarto, 2016). Kualitas karet yang elastis menjadikan karet terkenal dan sebagai sebuah komoditas yang digunakan di banyak produk dan peralatan di seluruh dunia, mulai dari produk-produk industri sampai rumah tangga (Harahap & Segoro, 2018).

Karet merupakan salah satu tanaman ekspor Indonesia yang memiliki peluang besar dalam perdagangan dunia. Peningkatan harga minyak bumi yang sangat tajam di pasaran internasional, menyebabkan permintaan terhadap karet alam naik pesat (Amiruddin et al., 2022). Tanaman karet menjadi komoditas perkebunan yang menduduki posisi cukup strategis sebagai sumber devisa non-migas untuk Indonesia (Anwar & Suwarto, 2016). Selain itu, Indonesia juga pernah menguasai produksi karet dunia dengan unggul bersaing dari produksi negara-negara lain. Berdasarkan data FAO, rata-rata tahun 2017 – 2021 Indonesia adalah negara pengekspor karet alam terbesar di dunia yang memberikan kontribusi sebesar 33,72% terhadap total ekspor karet alam dunia atau rata-rata ekspor karet alam dari Indonesia adalah 2,70 juta ton/tahun, sehingga jumlah persediaan karet alam Indonesia amat penting untuk pasar dunia. Terdapat delapan negara yang menjadi tujuan terbesar ekspor karet Indonesia pada tahun 2022. Total kontribusi kedelapan negara tersebut sebesar 74,13% (Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023).

Sebagai komoditas ekspor di Indonesia, Kebijakan Direktorat PPH Perkebunan mengarahkan agar karet ke dalam pengembangan produk bernilai tambah dan berdaya saing. Peningkatan produk perkebunan berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu mulai dari kegiatan penanaman, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hingga di meja konsumen dengan istilah *farm to table*. Ada beberapa penerapan sistem jaminan mutu, yaitu *Good Agricultural Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Process (GMP)*, *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Global GAP*, *Organic Farming*, *Keamanan Pangan/ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*, dan *Maximum Residue Levels (MRLs)*. Beberapa kegiatan pendukung peningkatan produksi karet yang dilakukan antara lain peremajaan tanaman karet (*replanting*) dan pemeliharaan kebun entres karet (bantuan pupuk dan saprodi lainnya) (Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, 2021).

Kebijakan pemerintah di Indonesia bersama Thailand dan Malaysia yang tergabung dalam *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) sepakat melakukan pembatasan ekspor melalui skema *Agreed Export Tonnage Scheme* (AETS). Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi *supply* karet alam di pasar dunia dengan mengurangi ekspor karet alam sehingga direspon dengan kenaikan harga di bursa dunia. Lebih lanjut Purwaningrat et al., (2020) menyatakan bahwa pengaruh penurunan penawaran domestik akan berimbas terhadap kenaikan harga ekspor karet alam dan mendorong kenaikan harga di tingkat produsen, tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah tidak mudah untuk menurunkan produksi karet karena ekonomi petani karet bergantung pada produksi harian. Nurdina et al., (2021) menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor karet yang dilakukan ternyata tidak memiliki jaminan untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sehingga dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut ternyata tidak memperbaiki harga karet alam petani.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah kawasan agribisnis di Sumatera Barat dengan potensi daerah pada sektor pertaniannya baik subsektor pangan, hortikultura, maupun perkebunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kabupaten Pasaman menduduki posisi nomor tiga setelah Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya sebagai wilayah dengan produksi karet terbanyak yaitu sebesar 30.784,70 ton. Karet menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pasaman karena diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat. Terdapat beberapa daerah sebagai kawasan pertanian tanaman karet di Kabupaten Pasaman. Salah satu daerah dengan produktivitas karet tertinggi pada tahun 2023 berada di Kecamatan Mampat Tunggul yaitu sebesar 1.260 kg/ha (BPS Kabupaten Pasaman, 2023).

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman karet di Kabupaten Pasaman, dari tahun 2009–2017 pemerintah daerah telah melakukan upaya peremajaan tanaman karet (*replanting*) yaitu mengganti tanaman tua dengan tanaman baru agar produktivitas karet meningkat. Pemilihan bibit yang bagus untuk tanaman karet menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas bahwa bibit yang bagus berasal dari tanaman karet okulasi karena produksi karet yang dihasilkan akan meningkat lebih tinggi. Kecamatan Mampat Tunggul merupakan salah satu daerah pengembangan karet okulasi di Kabupaten Pasaman. Selama program *replanting* tersebut, Dinas Pertanian memberikan bantuan insentif untuk membeli bibit karet kepada petani yang ingin melakukan peremajaan tanaman karet.

Porter (1990) menjelaskan konsep daya saing adalah kemampuan suatu produk atau komoditas dalam memasuki pasar lokal maupun pasar internasional. Kemampuan daya saing merupakan kemampuan suatu produk atau komoditas untuk memasuki, bertahan, dan bersaing di pasar terbuka. Daya saing juga termasuk kemampuan suatu negara untuk memasarkan produk yang dihasilkan dan memiliki keunggulan dari negara lain. Selain itu dalam konteks daya saing, sebuah produk atau komoditas yang dihasilkan juga mampu mempertahankan pasar atau bahkan memperluas pasar.

Daya saing usahatani karet merupakan kemampuan untuk mempertahankan perolehan laba dan pangsa pasar sehingga produsen dapat memperoleh keuntungan dari usahatani tersebut, yang dianalisis berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif di tingkat usahatani karet serta permintaan dan penawarannya. Peningkatan daya saing usahatani karet menjadi strategi penting untuk dilakukan dalam menghadapi perdagangan bebas dan menjamin kualitas dari produksi usahatani karet. Untuk melihat bagaimana daya saing dari suatu produk dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu tingkat keuntungan dan efisiensi. Menurut Monke & Pearson (1989), keuntungan terdiri atas keuntungan privat dan keuntungan sosial. Keuntungan privat berdasarkan pendapatan dan biaya yang diamati yang mengacu pada harga pasar aktual yang diterima atau dibayarkan oleh petani, pedagang, dan pengolah dalam sistem pertanian. Keuntungan sosial berdasarkan harga yang akan menghasilkan alokasi sumberdaya terbaik sehingga akan memberikan pendapatan nasional tertinggi. Keuntungan privat merupakan keuntungan yang diperoleh dengan adanya campur tangan pemerintah, sedangkan keuntungan sosial merupakan keuntungan tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Efisiensi dilihat dari dua sisi, yaitu keunggulan kompetitif dan komparatif (Pearson et al., 2005).

Penelitian tentang kebijakan pemerintah terhadap komoditas karet telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sahuri & Nugraha (2019) melakukan tentang kebijakan model sistem

tumpang sari tanaman karet untuk meningkatkan produktivitas karet di Indonesia. Jenifirza, et al., (2024) melihat pengaruh kebijakan *Agreed Export Tonnage Scheme* (AETS) terhadap ekspor karet alam Thailand, Indonesia, dan Malaysia ke Amerika Serikat. Nurdina, et al., (2021) menganalisis kebijakan kuota ekspor terhadap harga karet domestik Indonesia dan Laily, et al., (2022) tentang kebijakan kuota ekspor terhadap perdagangan karet alam Indonesia. Zikri & Hafizah (2023) meneliti tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap perkembangan ekspor karet Indonesia. Akan tetapi, penelitian tentang kebijakan terhadap *input* seperti program *replanting* (bantuan bibit okulasi) masih sedikit ditemukan. Adapun penelitian tentang kebijakan *input* telah dilakukan oleh Panjaitan, et al., (2017) yaitu pemberian pupuk bersubsidi. Rozci & Rizkiyah (2024) menyatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk berperan penting untuk membantu petani menekan biaya produksi dalam pasokan pupuk. Jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk non subsidi, biayanya akan sangat berbeda. Petani akan berpikir dua kali ketika membeli pupuk yang tidak bersubsidi karena harga yang tinggi. Dengan demikian penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah sangat bermanfaat bagi petani agar dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau dan berkualitas baik. Akan tetapi, bantuan pupuk subsidi untuk tanaman perkebunan, khususnya karet, telah ditiadakan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2024 bahwa pupuk subsidi diperuntukan untuk tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura serta tanaman perkebunan tertentu (kakao, kopi, dan tebu). Untuk itu, penting dilakukan penelitian tentang dampak setelah kebijakan pemerintah non subsidi pupuk untuk tanaman karet.

Dari penelitian terdahulu ditemukan bahwa belum ada kajian tentang dampak setelah kebijakan pemerintah non-subsidi pupuk untuk tanaman karet, khususnya di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas karet melalui keunggulan komparatif dan kompetitif di Kabupaten Pasaman dan menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas karet di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait daya saing karet di Kabupaten Pasaman sebagai dasar petani untuk meningkatkan kualitas hasil produksi karet serta menjadi fondasi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih memberi keuntungan kepada petani sesuai dengan misi kelima pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

## **Metodologi**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasaman dengan pemilihan lokasi secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu kawasan agribisnis sekaligus daerah penghasil karet terbesar di Sumatera Barat. Kegiatan penelitian dilakukan pada tanggal 15 November–15 Desember 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian ialah penelitian survei melalui pendekatan kuantitatif.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel secara sengaja (*purposive sampling*). Pengambilan sampel *purposive* dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu (1) petani karet dengan umur tanam karet di atas 5 tahun; (2) petani yang mengusahakan tanaman karet di atas 0,25 ha; (3) petani karet yang menggunakan bibit okulasi; dan (4) petani karet yang tergabung ke dalam kelompok tani. Berdasarkan *sampling* yang dilakukan, dipilihlah kecamatan dengan produktivitas karet tertinggi, yaitu Kecamatan Mampat Tunggul. Populasi petani karet di Kecamatan Mampat Tunggul kurang lebih sebanyak 712 orang dan

dipilih 30 orang responden yang memenuhi kriteria. Menurut Soekartawi (2003), jumlah sampel paling sedikit 30 orang yang dibutuhkan untuk menghindari bias pada perhitungan dalam analisis data.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani karet yang dipilih dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data primer yang dibutuhkan meliputi data karakteristik responden, biaya *input* dan *output* dan biaya lain yang diperlukan dalam usahatani karet. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, *World Bank*, *Alibaba World Trade*, Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Mampat Tunggul serta literatur-literatur terkait penelitian ini.

Penentuan harga privat berdasarkan harga aktual *input-output* di lokasi penelitian begitu juga dengan penentuan harga sosial untuk *input* domestik. Penentuan harga sosial untuk *input* yang diperjualbelikan secara internasional yang merupakan barang impor menggunakan harga CIF yang diperoleh dari total *Freight and Insurance* dengan harga FOB pada data *World Bank* dan *Alibaba World Trade* (2024), kemudian ditambahkan dengan biaya angkutan dari pelabuhan ke provinsi, dari provinsi ke Kabupaten, dari Kabupaten ke desa/lokasi kebun, serta biaya penanganan bongkar muat (Rp/liter). Penentuan harga bayangan *output* karet menggunakan harga FOB dari karet remah pada data BPS Indonesia tahun 2023, karena karet diperjualbelikan secara internasional dalam bentuk barang setengah jadi yaitu karet remah (*crumb rubber*).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan model analisis *Policy Analysis Matrix* (PAM). PAM merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pada tingkat harga dan teknologi yang ada apakah sistem usahatani memiliki daya saing, tingkat efisiensi sistem usahatani, serta membantu pengambil kebijakan pertanian dalam memberikan informasi dan analisis (Pearson et al., 2005). Melihat data penerimaan dan biaya produksi selama 25 tahun dengan tingkat diskonto (*discount rate*) sebesar 6% berdasarkan tingkat suku bunga KUR usaha kecil pada Bank BRI yang berlaku saat penelitian. Proses diskonto diperlukan untuk menentukan *Net Present Value* (NPV) dari setiap usahatani karet. Berdasarkan data dari penerimaan, biaya produksi, dan biaya lainnya (Putri et al., 2025).

Metode PAM dibentuk berdasarkan pada kumpulan data yang dijabarkan dengan berbagai rumus pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Matrik kebijakan *Policy Analysis Matrix* (PAM)

Uraian	Penerimaan	Biaya-Biaya		Keuntungan
		<i>Input Tradable</i>	<i>Input Non Tradable</i>	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Efek Divergensi	I	J	K	L

Sumber : Monke & Pearson (1989)

Keterangan:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| Keuntungan Privat       | :D=A-B-C   |
| Keuntungan Sosial       | :H=E-F-G   |
| Transfer Output         | :I=A-E     |
| Transfer Input Tradable | :J=B-F     |
| Transfer Faktor         | :K=C-G     |
| Transfer Bersih         | :L=I-(K+J) |

Rasio Biaya Privat	:PCR=C/(A-B)
Rasio Biaya Sumberdaya Domestik	:DRCR=G/(E-F)
Koefisien Proteksi Output Nominal	:NPCO=A/E
Koefisien Proteksi Input Nominal	:NPCI=B/F
Koefisien Proteksi Efektif	:EPC=(A-B)/(E-F)
Koefisien Keuntungan	:PC=D/H
Rasio Subsidi untuk Produsen	:SRP=L/E

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat terletak pada  $00^{\circ} 55' \text{ LU}$  -  $00^{\circ} 06' \text{ LS}$  dan  $99^{\circ} 45' \text{ BT}$  -  $100^{\circ} 21' \text{ BT}$  pada ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pasaman secara geografis dilintasi oleh garis khatulistiwa yang berada pada daerah Kecamatan Bonjol. Kabupaten Pasaman mempunyai luas wilayah  $3.947,63 \text{ km}^2$  terdiri atas 12 kecamatan dan 62 nagari. Dilihat dari luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luas  $69,56 \text{ km}^2$ , sedangkan kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Mampat Tunggul  $605,29 \text{ km}^2$  (BPS Kabupaten Pasaman, 2024).

Curah hujan rata-rata di Kabupaten Pasaman sepanjang tahun 2023 ialah 8,38 mm/bulan. Bulan Desember merupakan periode dengan rata-rata curah hujan tertinggi yaitu sebesar 16,04 mm/bulan. Suhu di Pasaman cenderung hangat dengan kelembaban yang cukup tinggi, hal ini menyebabkan curah hujan yang cukup. Kabupaten Pasaman beriklim tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara  $25\text{-}30^{\circ}\text{C}$ . Tekanan udara di Pasaman juga berperan dalam mempengaruhi pola cuaca, dimana tekanan udara tinggi cenderung menyebabkan cuaca lebih kering. Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasaman adalah jenis litosol dari bahan alluvial batuan beku pegunungan vulkanik, dengan pH tanah berkisar antara 5 hingga 7. Oleh karena itu daerah Pasaman menjadi daerah yang berpotensi sebagai syarat tumbuh tanaman karet (BPS Kabupaten Pasaman, 2024).

### 2. Karakteristik Responden

Berdasarkan jenis kelamin, petani sampel yang mengusahakan usahatani karet 90% merupakan laki-laki dan 10% adalah perempuan. Dalam usahatani, jenis kelamin merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas usahatani yang dilakukan. Petani yang berjenis kelamin laki-laki lebih produktif dibandingkan petani perempuan karena petani laki-laki memiliki fisik yang kuat dan mampu melakukan pekerjaan berat, sedangkan petani perempuan lebih sering melakukan pekerjaan ringan. Dalam usahatani karet, pekerjaan yang sering dilakukan oleh laki-laki adalah pengolahan lahan, penanaman, penyirangan, serta penyadapan, sedangkan pekerjaan yang sering dilakukan oleh perempuan adalah penyirangan dan penyadapan.

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi kemampuan fisik bekerja dan berpikir petani adalah umur. Kemampuan fisik petani akan lebih kuat ketika petani berumur muda dibandingkan petani yang berumur tua. Petani muda lebih cepat dalam mengadopsi hal-hal baru, karena petani muda lebih berani dalam mengambil risiko. Akan tetapi petani muda masih kurang memiliki pengalaman berusahatani maka untuk mengimbanginya mereka harus lebih dinamis sehingga cepat memperoleh pengalaman baru yang berharga dalam pengembangan usahatannya (Soekartawi, 1995). Berdasarkan perolehan dari data lapangan diketahui bahwa petani sampel dengan rentang umur 15 – 59 tahun sekitar 80% dan sisanya 20% petani sampel

berumur >59 tahun. Hal ini menunjukkan usahatani karet secara umum dilakukan oleh petani pada usia produktif.

Tingkat pendidikan petani sampel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan petani dalam usahatannya. Tingkat pendidikan merupakan acuan untuk melihat kemampuan dan keterampilan seseorang dalam mengadopsi teknologi yang sedang berkembang. Tingkat pendidikan petani sampel dalam penelitian ini adalah 33,33% berpendidikan SD, 16,67% berpendidikan SMP, 33,33% berpendidikan SMA, dan 16,67% berpendidikan S-1. Menurut Soekartawi (1995) pendidikan akan mempengaruhi pola pikir petani dalam berusahatani. Petani dengan pendidikan yang rendah serta berumur masih muda menyebabkan petani akan sulit mengadopsi inovasi. Petani dengan tingkat pendidikan yang lebih baik akan mudah mengadopsi inovasi. Selain pendidikan formal, pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan informal, seperti pengalaman sendiri, penyuluhan, maupun pelatihan.

Status kepemilikan lahan adalah salah satu hal yang penting dalam menentukan keputusan penggunaan *input* dan *output* usahatani dan jenis komoditas yang akan diusahakan. Menurut Soekartawi (1995), petani terbagi atas tiga jenis berdasarkan status kepemilikan lahan, yaitu petani pemilik penggarap; petani pembagi hasil di mana dalam mengambil keputusan untuk menentukan besarnya pembagian keuntungan yang diperoleh ditetapkan bersama, yaitu 60% untuk pemilik dan 40% untuk petani pembagi hasil; dan petani pembagi hasil dengan pengambilan keputusan berada pada pemilik tanah. Berdasarkan status kepemilikan lahan, 100% petani sampel yang melakukan usahatani karet adalah petani lahan pemilik sendiri sehingga keputusan dalam penggunaan *input* dan *output* usahatani karet berada pada petani itu sendiri.

Berdasarkan luas lahan, petani sampel memiliki luas lahan 0,25 – 1 ha sebanyak 53,33%, dan > 1 ha sebanyak 46,67%. Menurut Soekartawi (1995) luas lahan akan mempengaruhi skala usaha. Jika lahan yang diusahakan besar, akan semakin besar juga skala usaha yang akan mempengaruhi efisiensi atau tidaknya.

### **3. Analisis Daya Saing Karet di Kabupaten Pasaman**

Daya saing suatu komoditas mencerminkan kemampuan suatu produsen untuk berkompetisi dengan komoditas lainnya. Pengukuran daya saing dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang meliputi tingkat keuntungan dan efisiensi (Pearson et al., 2005). Hasil analisis menggunakan PAM menunjukkan struktur penerimaan dan biaya produksi usahatani karet pada periode penelitian. Selain itu, tingkat suku bunga KUR usaha kecil Bank BRI sebesar 6% yang berlaku saat penelitian digunakan sebagai informasi pendukung dalam menafsirkan kondisi finansial usahatani karet. Proses diskonto digunakan sebagai pendekatan untuk menilai kelayakan finansial usahatani karet secara konseptual melalui perhitungan Net Present Value (NPV), namun tidak menjadi fokus utama analisis. Berdasarkan data penerimaan, biaya produksi, dan biaya lainnya (Putri et al., 2025), selanjutnya dihitung nilai harga privat dan harga sosial. Hasil perhitungan PAM untuk komoditas karet di Kabupaten Pasaman disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Policy Analysis Matrix (PAM) karet di Kabupaten Pasaman**

Uraian	Penerimaan Output	Input		Keuntungan
	(Revenue)	Input Tradable	Faktor Domestik	
Privat	321.345.579,21	16.523.268,22	196.960.783,19	107.861.527,80
Sosial	623.964.950,87	15.399.364,83	191.700.852,32	416.864.733,72
Dampak Divergensi	-302.619.371,66	1.123.903,39	5.259.930,87	-309.003.205,92

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai penerimaan dan biaya produksi dihitung ke dalam analisis finansial dan juga analisis ekonominya, kemudian dialokasikan ke dalam komponen *input tradable* dan *input non tradable*. Hasil penerimaan didapat dari mengalikan jumlah *output* yang dihasilkan dengan harga jual *output*. Adapun rata-rata harga jual karet di Kabupaten Pasaman saat penelitian ialah Rp11.000 – Rp12.000 per kg. Untuk penerimaan sosial (*social profitability*) harga jual didasarkan pada harga bayangan sebesar Rp21.933,63 per kg. Hasil analisis privat dan sosialnya dapat dilihat bahwa pengusahaan usahatani karet di Kabupaten Pasaman menguntungkan, karena dilihat berdasarkan hasil penerimaan privat dan penerimaan sosialnya yang bernilai positif.

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis penerimaan privat dan penerimaan sosial yang bernilai positif yang mengindikasikan usahatani karet di Kabupaten Pasaman menguntungkan. Keuntungan privat yang didapatkan sebesar Rp107.861.527,80 itu menunjukkan hasil besar dari nol. Hal ini berarti bahwa kegiatan usahatani karet di Kabupaten Pasaman memiliki daya saing pada tingkat harga dan teknologi yang ada sekarang ini. Keuntungan sosial yang didapatkan adalah sebesar Rp416.864.733,72 lebih dari nol, maka usahatani karet di Kabupaten Pasaman menguntungkan dari segi ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengusahaan perkebunan karet memiliki efisiensi yang baik pada tingkat harga dan teknologi yang ada sekarang.

Hasil perhitungan divergensi didapat dari selisih antara penerimaan privat dan penerimaan sosial. Divergensi akan menyebabkan perbedaan antara harga aktual dan harga sosialnya. Divergensi penerimaan pada hasil penelitian bernilai negatif yaitu -Rp 302.619.371,66. Artinya, divergensi menyebabkan adanya implisit pajak atau adanya transfer sumber daya yang akan mengurangi keuntungan sistem. Kegagalan pasar merupakan salah satu penyebab terjadinya divergensi. Pasar gagal apabila tidak mampu menciptakan harga kompetitif untuk menciptakan alokasi sumber daya maupun produk yang efisien. Penyebab lain dari timbulnya divergensi adalah adanya kebijakan pemerintah yang bersifat distortif (Pearson et al., 2005).

#### 4. Analisis Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kelayakan usahatani secara finansial berdasarkan harga aktual di tingkat petani, dimana harga tersebut dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Keunggulan kompetitif ditentukan berdasarkan nilai dari keuntungan privat/*Private Profitability* (PP) dan nilai rasio biaya privatnya/*Private Cost Ratio* (PCR).

Pada hasil analisis untuk komoditas karet di Kabupaten Pasaman diperoleh nilai koefisien PCR<1 sebesar 0,65. Nilai PCR tersebut berarti bahwa untuk mendapatkan nilai

tambahan *output* sebesar satu satuan maka diperlukan tambahan biaya faktor domestik senilai 0,65. Nilai PCR menunjukkan bahwa usahatani karet sudah efisien dan memiliki keunggulan kompetitif. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan, et al., (2017) di mana nilai PCR usahatani karet Kabupaten Toba Samosir <1, yaitu 0,06 per petani. Artinya, ini secara ekonomi mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat serta memiliki keunggulan kompetitif dan secara finansial karet yang diteliti dapat bersaing di tingkat pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Jika dilihat dari nilai PCR yang diperoleh, diketahui bahwa secara kompetitif usahatani karet di Kabupaten Pasaman memiliki daya saing yang rendah jika dibandingkan dengan usahatani dari penelitian terdahulunya. Meskipun bibit yang digunakan oleh petani sampel di Kabupaten Pasaman merupakan bibit okulasi, pemeliharaan yang dilakukan oleh petani belum sesuai dengan standar anjuran yang baik untuk budidaya karet okulasi.

## 5. Analisis Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif adalah ukuran daya saing dari suatu komoditas dengan menggunakan asumsi perekonomian sama sekali yang mengalami gangguan atau distorsi. Keunggulan komparatif berkaitan dengan kelayakan ekonomi yang menilai aktivitas ekonomi bagi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat siapa yang terlibat pada aktivitas ekonomi tersebut. Analisis keunggulan komparatif komoditas karet di Kabupaten Pasaman dapat diukur dengan indikator nilai Keuntungan Sosial/*Social Profitability* (SP) dan nilai Rasio Biaya Domestik/*Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR).

Keuntungan sosial yang didapat dari usahatani karet petani di Kabupaten Pasaman ialah Rp416.864.733,72 yang bernilai positif. Nilai positif besar dari nol ini menggambarkan bahwa usahatani karet yang dilakukan petani responden menguntungkan dan layak diusahakan dalam kondisi tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Usahatani karet di Kabupaten Pasaman memiliki SP lebih besar dari PP sebesar Rp 107.861.527,80. Nilai SP lebih besar dari nilai PP artinya bahwa usahatani karet di lokasi penelitian lebih menguntungkan pada saat tidak adanya intervensi dari pemerintah. Artinya, walaupun tidak ada intervensi pemerintah berupa pajak yang dibebankan kepada produsen maupun pedagang, petani dapat menikmati harga karet yang sama dengan harga karet di tingkat FOB atau mendekati harga FOB. Nilai PP lebih kecil daripada nilai SP terjadi akibat penerimaan ekonomi lebih besar karena harga FOB karet tinggi, yaitu Rp21.933,63 per kg, sementara harga karet di tingkat petani sebesar Rp11.000 – Rp12.000 per kg. Faktor lain yang mempengaruhi harga karet yang diterima petani berbeda dengan harga di tingkat FOB adalah faktor konversi untuk pengolahan karet alam menjadi karet remah yang akan dieksport, dan biaya transportasi yang ditanggung oleh pedagang besar ketika membawa karet ke wilayah lain. Intervensi pemerintah berupa pajak, biaya angkut, dan biaya transportasi serta pengaruh dari harga BBM serta biaya penyimpanan di gudang menjadi sebab perbedaan pengaruh harga yang diterima oleh petani.

Nilai DRCR sebesar 0,32 berarti komoditas karet lebih menguntungkan jika diusahakan di dalam negeri daripada mengimpornya. Kondisi ini disebabkan karena biaya yang dibutuhkan lebih besar jika mengimpor daripada memproduksinya sendiri. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh De Santana, et al., (2018) tentang daya saing karet di Bahia Selatan (Brazil) yang mendapatkan nilai DRCR sebesar 0,23 sehingga memiliki keunggulan

komparatif.

Perbedaan nilai DRCR antar wilayah ini bisa disebabkan oleh keadaan wilayah tersebut, bahan yang digunakan oleh petani, cara pengusahaan budidaya karet, dan perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Dari perbandingan dengan lokasi penelitian lain, daya saing dari pengusahaan karet masih tergolong rendah dan masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan daya saing.

## 6. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah

### 6.1 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Bentuk kebijakan pemerintah berupa subsidi maupun pajak pada komoditas agribisnis dapat berpengaruh positif maupun negatif bagi pelaksana kebijakan. Adapun kebijakan terhadap komoditas karet yaitu kebijakan harga dalam bentuk hambatan perdagangan internasional berupa kuota ekspor yang juga menjadi kebijakan negara produsen karet di dunia dalam skema AETS dan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada produsen industri karet. Selain itu ada kebijakan makroekonomi yang secara tidak langsung juga mempengaruhi *output* komoditas karet yaitu berupa kebijakan nilai tukar. Dampak kebijakan pemerintah dapat dilihat menggunakan nilai TO (*Transfer Output*) dan NPCO (*Nominal Protection Coefficient Output*).

Nilai TO adalah -Rp302.619.371,66 yang berarti harga privat dari karet di lokasi penelitian lebih rendah dibandingkan dengan harga sosialnya yang mengindikasikan bahwa tidak adanya subsidi pada *output* yang membuat harga privat petani lebih rendah daripada harga sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya intervensi pemerintah terhadap *output* usahatani lebih menguntungkan konsumen, karena konsumen membeli dengan harga yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Dengan demikian terjadi pengalihan surplus dari produsen ke konsumen. Nilai TO menunjukkan bahwa petani karet kehilangan keuntungan sebesar Rp302.619.371,66. Hal tersebut terjadi disebabkan harga nilai tukar uang yang seharusnya akibat perdagangan dalam penentuan valuta asing, pajak ekspor, dan juga struktur pasar karet yang cenderung monopsoni yang mengakibatkan harga yang benar-benar diterima oleh petani sangat rendah sehingga petani cenderung sebagai penerima harga (*price taker*).

Pada hasil perhitungan nilai NPCO yang didapatkan adalah sebesar 0,52. Hal ini berarti terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga privat karet lebih rendah daripada harga sosialnya. Nilai NPCO kecil dari satu menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah yang menghambat komoditas dengan pajak atau hambatan ekspor. Nilai NPCO yang lebih rendah dari satu menunjukkan bahwa petani tidak menerima insentif yang diberikan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alghoziyah, et al., (2016) di Lampung Utara bahwa nilai TO bernilai negatif sebesar -Rp168.384.502,65 nilai NPCO kurang dari satu, yaitu 0,57 dan juga sejalan dengan penelitian oleh ELSamie, et al., (2020) tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap kapas di Mesir yang berarti adanya intervensi pemerintah terhadap *output* sehingga lebih menguntungkan konsumen dan mengindikasikan adanya hambatan ekspor *output* berupa pajak maupun hambatan pembatasan kuota ekspor.

### 6.2 Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input

Produksi dapat ditingkatkan juga melalui intervensi pemerintah terhadap harga *input*. Salah satu kebijakan pada *input* berupa subsidi *input* yang diberikan kepada produsen. Kebijakan ini diharapkan dapat merangsang produsen untuk dapat menggunakan *input* dalam rangka meningkatkan produktivitas, tetapi kebijakan subsidi *input tradable* yaitu pupuk anorganik

terhadap komoditas karet di Kabupaten Pasaman sudah ditiadakan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2024. Sedangkan kebijakan terhadap faktor domestik, Pemerintah daerah memberikan bantuan bibit okulasi untuk program peremajaan karet sepanjang tahun 2009 – 2017. Intervensi ini dapat dilihat dari nilai *Transfer Input* (TI). TI menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang diterapkan pada *input tradable* mengakibatkan terjadinya perbedaan *input tradable* privat dan sosialnya. NPCI menjelaskan adanya proteksi terhadap produsen atau konsumen dari *input tradable*, sedangkan TF menunjukkan besarnya subsidi terhadap *input non tradable*.

Nilai TI yang diperoleh ialah positif sebesar Rp1.123.903,39 per hektar, hal ini berarti ada transfer pendapatan dari petani kepada produsen *input tradable*. Nilai divergensi yang positif disebabkan harga sosial dari *input tradable* lebih rendah daripada harga privatnya karena *input tradable* yang digunakan oleh petani adalah input non-subsidi.

Nilai NPCI usahatani karet diperoleh sebesar 1,07 dan hal ini mengindikasikan adanya proteksi terhadap produsen *input*. Petani sebagai konsumen pupuk dirugikan dengan tingginya harga *input*. Dampak kebijakan *input tradable* pada karet alam di Kabupaten Pasaman ini mengakibatkan biaya produksi menjadi lebih tinggi karena petani harus membeli pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari harga efisiensinya. Hal ini menyebabkan petani karet di Kabupaten Pasaman jarang memberi pupuk bagi tanaman karet.

Nilai TF pada hasil penelitian adalah Rp5.259.930,87 bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa harga *input non tradable* yang dikeluarkan oleh pemerintah pada harga privatnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga *input non tradable* yang dikeluarkan pada harga sosialnya. Artinya tidak ada proteksi pada *input non tradable*. Meskipun pemerintah memberikan bantuan bibit karet kepada petani tapi hal tersebut tetap membuat nilai TF bernilai positif karena hal ini disebabkan oleh bunga modal privat lebih tinggi dibandingkan dengan bunga modal sosialnya.

### **6.3 Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input-Output**

Indikator yang digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan *input-output* adalah *Effective Protection Coefficient* (EPC), *Net Transfer* (NT), *Profitability Coefficient* (PC), dan *Subsidy Ratio to Producers* (SRP). Efektivitas kebijakan input–output usahatani karet pertama-tama dianalisis melalui nilai Effective Protection Coefficient (EPC).

Nilai EPC adalah 0,50. Nilai EPC menunjukkan kurang dari satu yang artinya belum berjalannya secara efektif kebijakan pemerintah terhadap *input-output* usahatani karet. Hal ini menandakan bahwa harga *output* dan harga *input tradable* yang diterima petani hanya sebesar 50 persen dari harga yang seharusnya (harga sosial), atau nilai tambah yang dinikmati petani secara aktual lebih rendah daripada nilai tambah secara sosial atau yang seharusnya diterima apabila tidak terjadi distorsi kebijakan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Alghoziyah et al. (2016) di mana nilai EPC pada penelitian tersebut adalah 0,57 yang kurang dari satu sehingga kebijakan pemerintah tidak bersifat protektif.

Pada hasil penelitian nilai NT bernilai negatif yaitu -Rp309.003.205,92 yang berarti belum terlihat adanya insentif ekonomi untuk dapat meningkatkan produksi karet sehingga surplus produsen berkurang sebesar Rp309.003.205,92 per hektar per tahun. Nilai NT yang negatif menunjukkan adanya distorsi pasar yang menyebabkan ketidakpastian sasaran kebijakan pemerintah terhadap di Kabupaten Pasaman.

Nilai PC hasil penelitian adalah sebesar 0,26, artinya petani menerima keuntungan privat lebih kecil dibandingkan keuntungan sosialnya sebesar 26 persen. Petani pada lokasi penelitian harus

mengeluarkan dana kepada konsumen sebesar 26 persen sehingga secara keseluruhan kebijakan pemerintah tidak memberikan insentif kepada produsen dan akhirnya membuat keuntungan yang diterima oleh petani lebih rendah jika dibandingkan dengan tanpa adanya kebijakan pemerintah. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Alghoziyah, et al., (2016) di mana nilai PC kurang dari satu yaitu sebesar 0,52. Nilai PC yang rendah mengindikasikan bahwa tidak efektifnya kebijakan pemerintah yang merangsang untuk peningkatan produksi dan produktivitas pada petani karet.

Hasil penelitian nilai SRP adalah -0,50, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan petani mengeluarkan biaya produksi lebih besar 50 persen dari biaya imbalan untuk berproduksi. Nilai SRP menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang merugikan bagi petani.

## 7. Analisis Sensitivitas

### 7.1 Analisis Sensitivitas Perubahan Harga Input

Analisis sensitivitas jika terjadi peningkatan biaya *input tradable* sebesar 10% dan faktor lain dianggap tetap. Hal ini dilakukan berdasarkan data harga pupuk anorganik non-subsidi pada penelitian yang dilakukan oleh Boto, et al., (2021) dan harga herbisida menurut penelitian yang dilakukan oleh Aznur (2021). Skenario dilakukan pada peningkatan harga *input* sebesar 10%, maka biaya *input* juga akan mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh petani yang mengakibatkan keuntungan privat usahatani karet mengalami penurunan sebesar 1,55%. Walaupun begitu, adanya skenario peningkatan biaya *input tradable* tetap memberikan keuntungan pada usahatani karet Kabupaten Pasaman dan layak untuk dilaksanakan.

### 7.2 Analisis Sensitivitas Perubahan Harga Output

Analisis sensitivitas dilakukan jika terjadi penurunan harga *output* karet sebesar 50% dan faktor lain dianggap tetap. Skenario ini dilakukan berdasarkan data harga karet di Kabupaten Pasaman sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.000/kg. Penurunan harga jual karet akan mempengaruhi perubahan penerimaan yang diterima petani. Keuntungan privat petani jika terjadi perubahan harga *output* adalah sebesar -Rp52.811.261,81 dan keuntungan sosial sebesar Rp104.882.258,28. Perubahan harga *output* sebesar 50% berdampak terhadap keuntungan privat menjadi minus dan membuat komoditas karet di Kabupaten Pasaman tidak memiliki keunggulan kompetitif sedangkan nilai keuntungan sosial bernilai positif dan komoditas karet masih dalam kategori keunggulan komparatif

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengusahaan komoditas karet di Kabupaten Pasaman memiliki daya saing dengan keuntungan privat dan keuntungan sosial bernilai positif. Nilai DRCR kurang dari satu yaitu 0,32 menunjukkan bahwa komoditas karet memiliki keunggulan komparatif sehingga lebih menguntungkan jika diusahakan di dalam negeri dibandingkan jika diimpor. Nilai PCR kurang dari satu yaitu 0,65 menunjukkan bahwa usahatani karet telah efisien dan memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing pada kondisi perekonomian aktual. Dampak kebijakan pemerintah terhadap *output* karet di Kabupaten Pasaman menyebabkan harga privat lebih rendah dibandingkan dengan harga sosialnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai TO yang negatif. Dampak kebijakan pemerintah terhadap *input* menyebabkan harga privat *input-tradable* lebih tinggi dibandingkan dengan harga sosialnya yang dapat dilihat dari nilai TI yang positif, sedangkan harga privat *input non tradable* lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya yang

ditunjukkan oleh nilai TF yang positif. Dampak kebijakan pemerintah terhadap *input-output* menyebabkan terjadinya penurunan surplus produsen yang menunjukkan belum adanya insentif ekonomi untuk meningkatkan produksi yang dilihat dari nilai NT yang negatif. Hal ini berdampak pada ekonomi lokal yaitu berkurangnya produktivitas dan daya saing karet di pasar regional dan nasional.-Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas usahatani karet perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing komoditas karet dan pendapatan petani. Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu memperkuat peran penyuluh pertanian dalam memberikan bimbingan kepada petani karet, khususnya terkait pengelolaan usahatani, teknik budidaya, penggunaan input produksi, serta strategi pemasaran, sehingga petani mampu memperoleh harga yang lebih kompetitif.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah cenderung lebih menguntungkan konsumen dibandingkan produsen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan insentif kepada petani karet, baik dari sisi input maupun output. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan perluasan areal tanam serta penerapan kembali subsidi pupuk untuk komoditas karet.
3. Pemerintah pusat perlu berperan dalam menstabilkan harga jual karet di tingkat petani. Selain itu, kebijakan terkait harga bahan bakar minyak (BBM) perlu ditinjau kembali karena berpengaruh terhadap peningkatan biaya distribusi dan pengiriman karet ke pedagang besar.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis komparatif antara Kabupaten Pasaman dan kabupaten lain yang memiliki produksi karet signifikan guna mengidentifikasi perbedaan dan persamaan tingkat daya saing komoditas karet.

### **Ucapan Terima Kasih dan Penyandang Dana**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan atau penulisan artikel ini.

### **Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

### **Referensi**

- Alghoziyah, A., Ismono, H. R., & Sayekti, W. D. (2016). Daya Saing Usahatani Karet Rakyat di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. *Jiia*, 4(3), 243–252.
- Amiruddin, A., Heliawaty, & Fadhillah, A. (2022). Posisi Keunggulan Kompetitif Daya Saing Karet Indonesia. *Agrisep*, 23(2), 1–6.
- Anwar, R. N., & Suwarto. (2016). Pengelolaan Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Muell. Arg) di Sumatera Utara dengan Aspek Khusus Pembibitan Crop. *Bul. Agrohorti*, 334(1951), 94–103.

- Aznur, T. Z. (2021). Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 69–77. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2034>
- Boto, A. B., Khairati, R., & Ifdal, I. (2021). Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Komoditas Kopi Arabika Kabupaten Solok. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.30559/jpn.v16i01.216>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. (2023). *Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2023*. Pasaman: BPS Kabupaten Pasaman.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman. (2024). *Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2024*. Pasaman: BPS Kabupaten Pasaman.
- De Santana, A. S., Soares, N. S., & Schröder, C. A. (2018). Competitiveness and efficiency for the rubber tree production system in southern bahia (Brazil) through by the policy analysis matrix (PAM). *Revista Arvore*, 42(6), 1–10. <https://doi.org/10.1590/1806-90882018000600006>
- Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. (2021). *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 (Revisi 1)*. Jakarta, Indonesia.
- ELsamie, M. A., Ali, T., & Eliw, M. (2020). Impact of Agricultural Policies on the Egyptian Cotton Sector Using Policy Analysis Matrix. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 15(1), 50–59. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/v15i130207>
- Harahap, N. H. P., & Segoro, B. A. (2018). Analisis Daya Saing Komoditas Karet Alam Indonesia ke Pasar Global. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1(2), 130–143. <https://doi.org/10.23969/transborders.v1i2.992>
- Jenifirza, R., Febriamansyah, R., & Fitriana, W. (2024). Pengaruh kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) terhadap ekspor karet alam Thailand, Indonesia dan Malaysia ke Amerika Serikat. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(4), 1402–1411. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/>
- Laily, D. W., Atasa, D., & Wijayanti, P. D. (2022). Dampak Kuota Ekspor Terhadap Perdagangan Karet Alam Indonesia. *Agromix*, 217–226.
- Monke, E. A., & Pearson, S. R. (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. Cornell University Press.
- Nurdina, A., Harmini, & Rifin, A. (2021). Pengaruh Kuota Ekspor Terhadap Harga Karet Domestik Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15(2), 257–276.
- Panjaitan, M. H., Sihombing, L., & Kesuma, S. I. (2017). *Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Karet Di Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba Samosir*. 1–148.
- Pearson, S., Gotsch, C., & Sjaiful, B. (2005). *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nomor 01/Permentan/Sr.140/9/2024 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*.
- Porter. (1990). *Competitive Advantage Of Nations*. Word Press.
- Purwaningrat, L., Novianti, T., & Dermoredjo, S. (2020). Dampak Kebijakan International Tripartite Rubber Council (ITRC) terhadap Kesejahteraan Petani Karet Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(2), 411–424.

- <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.02.18>
- Putri, A. Z., Tanjung, F., & Mutiara, V. I. (2025). Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Karet (*Hevea Brasiliensis*) Pada Perkebunan Rakyat di Kabupaten Pasaman. *Joseta*, 7(2), 62–72. <https://doi.org/10.25077/joseta.v7i2.633>
- Rozci, F., & Rizkiyah, N. (2024). Subsidi Pupuk : Kebijakan , Implementasi , dan Peningkatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 12(1), 12–21.
- Sahuri, S., & Nugraha, I. S. (2019). Peremajaan Karet dan Model Pengembangan Tumpangsari Karet Berkelanjutan di Indonesia. *Perspektif*, 18(21), 87–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/psp.v18n2.2019>, 87-90
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. (2023). *Buku Outlook Komoditas Perkebunan Karet*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Soekartawi. (2003). *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekartawi. (1995). *Analisis Usahatani*. UI PRESS.
- Zikri, M., & Hafizah, D. (2023). Dinamika perkembangan ekspor karet Indonesia: pendekatan model koreksi kesalahan (ECM) studi kasus periode 2012-2022. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(4), 3551–3562.